



**SUKMA: JURNAL PENDIDIKAN**

ISSN: 2548-5105 (p), 2597-9590 (e)

Volume 4 Issue 2, Juli-Desember 2020, pp. 161-178

<https://doi.org/10.32533/04204.2020>

[www.jurnalsukma.org](http://www.jurnalsukma.org)

## **KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA**

**Susetya Herawati**

*Universitas Krisna Dwipayana Jakarta, Indonesia*

*email: herawati.iip@gmail.com*

### **Abstrak**

*Kebangkitan Nasional yang dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, berlanjut pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah sebuah kesadaran dari kaum muda terdidik yang bangkit dengan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan tersebut saat ini diisi oleh generasi muda melalui peran sertanya dalam pembangunan. Mencintai negara bangsa dan daerahnya dengan melakukan pembangunan melalui nilai-nilai budaya lokal sebagai wujud dari kesadaran bela negara. Pendidikan kewirausahaan menjadi salah*

*satu upaya pemuda untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai minat, bakat dan potensi untuk menjadi pemuda yang mandiri secara ekonomi. Kesadaran bela negara melalui kewirausahaan dengan mengutamakan nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep Dynamic Governance (thinking ahead, thinking again dan thinking across) yang oleh Ki Hadjar Dewantara direpresentasikan dalam berkarya yang produktif melalui cara Niteni, Niroke dan Nambahi. Keberhasilan Pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari belanegara merupakan perwujudan dari sila ke lima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**Katakunci:** bela negara, kewirausahaan, pemerintahan dinamis, generasi muda

## **A. Pendahuluan**

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang digali oleh para *founding fathers* dari akar budaya bangsa Indonesia serta telah ditetapkan sebagai dasar negara (*staat fundamental norm*) dan pandangan hidup bangsa (*welt anschauung*) dalam upaya menjaga keutuhan bangsa-negara maupun dalam mencapai tujuan nasional. Dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia juga memiliki cara pandang (visi) “Wawasan Nusantara” yaitu visi kenegaraan sekaligus semangat yang memandang seluruh kepulauan Indonesia beserta seluruh isi dan kandungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara ini tumbuh dan berkembang secara bertahap, dibangun secara internal dengan mengikut sertakan seluruh kalangan bangsa Indonesia, dan secara eksternal dalam perjuangan di fora internasional khususnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebuah ironi, kini kita menyaksikan kemunduran budaya yang diwarnai dengan lunturnya Pancasila, patriotisme, nasional-

isme, semangat Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, gotong-royong, musyawarah-mufakat, dsb. Sebaliknya telah tumbuh subur budaya pecundang (*looser mentality*), mental “kere” (*culture of poverty*), budaya “*short cut*”, konsumtivisme, hedonisme, materialisme, machiavelianisme, individualisme, fanatisme sempit bahkan radikalisme. Sehingga, bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh keramah-tamahan telah berubah drastis dalam waktu relatif singkat menjadi penuh konflik, anarkhi, tawuran, amuk massa dan sebagainya yang dapat kita saksikan hampir setiap hari di layar televisi atau mass media lainnya. Wawasan Nusantara sebagai visi kenegaraan yang memandang Indonesia beserta seluruh isi dan kandungannya sebagai satu kesatuan yang utuh nyaris sirna.

Mencermati permasalahan tersebut dibutuhkan satu kebijakan pendidikan yang mengedepankan budaya sebagai tatanan nilai dalam menumbuhkan minat, dan bakat bagi generasi muda sehingga mereka akan menjadi produktif. Pendidikan kewirausahaan yang akan mengubah mindset para generasi muda untuk mampu menumbuhkan kreatifitas, inovasi, dan menjadi solusi untuk permasalahan pekerjaan pemuda sendiri, sehingga tercipta pemuda yang mandiri, yang mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di daerahnya.

Kesadaran bela negara bukanlah bawaan dari lahir, demikian juga dengan kewirausahaan. Semua itu perlu dipelajari melalui dunia pendidikan, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui kewirausahaan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila ke lima Pancasila adalah sebuah cita-cita dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasa adil dan sejahtera tersebut dapat dibangun dari setiap individu pemuda yang memiliki karakter kreatif, inovatif, mandiri, ulet dan tangguh dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi.

## **B. Pendidikan Kewirausahaan**

Kebijakan pendidikan kewirausahaan yang sedang dicanan-

gkan melalui program kampus merdeka belajar memiliki dampak strategis dalam mempersiapkan generasi muda untuk mandiri dan bahkan mencintai negerinya. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi salah satunya adalah kegiatan wirausaha. Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dan IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai (Buku Panduan Merdeka belajar 2020:19). Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Shefsky (dalam Nugroho 2015) menyatakan bahwa *entrepreneurs are made, not born*. Jadi entrepreneur dapat dipelajari dan diajarkan serta dididik menjadi entrepreneur tidak memandang latar belakangnya, hal ini menjadikan kita optimis bahwa setiap orang dapat menjadi entrepreneur. Kewirausahaan merupakan sebuah proses penciptaan yang baru, dan membuat sesuatu yang

berbeda dari yang sudah ada (inovasi), dengan tujuan tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungannya. Faktor motivasi untuk menjadi wirausaha tersebut dapat diringkas Lupiyoadi (2004) sebagai berikut:

- *The foreign refugee*, peluang-peluang ekonomi di negara lain yang lebih menguntungkan sehingga mendorong seseorang pergi meninggalkan negaranya.
- *The corporate refugee*, pekerja-pekerja yang tidak puas dengan lingkungan perusahaannya. Merasa kepuasan kerjanya akan meningkat dengan memulai dan menjalankan bisnis sendiri.
- *The parental (parental) refugee*, Pengalaman bisns dari keluarganya dan pada perkembangannya mereka ingin mencoba bisnis sendiri diluar kebiasaan yang di jalankan keluarganya.
- *The feminist refugee*, para perempuan yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di bandingkan kaum pria, baik dalam pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat. Maka kaum wanita ini akan membuktikan dirinya mampu dengan mendirikan perusahaan.
- *The housewife refugee*, para ibu rumah tangga yang sibuk membantu suaminya dalam hal keuangan karena desakan kebutuhan.
- *The society refugee*, anggota masyarakat yang tidak setuju dengan kondisi lingkungannya dan menjalankan usaha yang tidak terikat dengan lingkungannya.
- *The educatial refugee*. Banyak orang yang gagal dalam studi menjadi terpacu dengan berwirausaha.

Wirausaha merupakan pemain paling penting dalam pembangunan ekonomi global. Bukan pilihan yang aneh jika kemudian kewirausahaan dijadikan alternatif kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan pemuda dari jurang kemiskinan. Lebih lanjut disampaikan oleh Lupiyoadi ada lima karakter untuk membangun mindset wirausaha yaitu:

- Mereka sangat bersemangat dalam melihat/mencari peluang-peluang baru.
- Mereka mengejar peluang dengan disiplin yang ketat.
- Mereka hanya mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang lain yang melelahkan diri dan organisasi mereka.
- Mereka fokus pada pelaksanaan.
- Mereka mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka.

### **C. Problem Generasi Muda pada era Globalisasi**

Seperti yang disampaikan oleh United Nation dalam laporan *World Population Prospect* (2011), bahwa Indonesia diperkirakan akan mendapat bonus demografi pada tahun 2020-2030 yang tentu saja akan menguntungkan dari sisi pembangunan. Pada periode tersebut jumlah usia produktif akan meningkat mencapai 180-190 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia non produktif akan menurun hingga 82-85 juta jiwa. Perubahan transisi demografi ini tentu saja membawa dampak terhadap beban tanggungan pada periode tersebut dengan mencapai titik terendah yang berkisar pada 44% yang berarti setiap 100 orang usia produktif akan menanggung beban sekitar 51 orang usia tidak produktif. Maka sangat penting untuk melihat pemuda sebagai agen pembangunan yang perlu disadarkan akan perannya dalam membela negara dengan potensi yang di milik dari dalam dirinya dan dari luar dirinya sebagai bangsa Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika.

Dalam situasi dunia yang semakin mengglobal, Indonesia tidak bisa lagi membanggakan kekayaan sumber daya alamnya, dibutuhkan strategi pembangunan untuk menghadapinya yaitu (1) Kualitas sumber daya manusia yang memadai, (2). Pelayanan publik yang baik, dan (3) Kepedulian terhadap lingkungan. Posisi generasi muda di Indonesia memiliki sejarah dan memori heroik sejak masa perjuangan pra-kemerdekaan yang senantiasa dikenang sampai hari ini. Kemerdekaan Indonesia yang diprokla-

masikan pada 17 Agustus 1945 merupakan institusionalisasi dalam bentuk negara dari deklarasi dan Sumpah Pemuda 1928. Begitupun pada dekade berikutnya, pemuda dan mahasiswa selalu tampil di depan setiap terjadi perubahan sosial politik nasional, misalnya tahun 1965, 1974 dan 1998. Hanya saja setiap zaman melahirkan peluang dan tantangan yang berbeda sehingga peran pemuda di era reformasi tidaklah sama dengan zaman sebelumnya. Dahulu pemuda dibesarkan dalam situasi ideologis, terutama ketika dihadapkan pada kekuatan komunisme yang anti Pancasila. Sekarang ketika ruang kebebasan berekspresi semakin terbuka, ketika demokrasi semakin menguat, maka gerakan demonstrasi turun ke jalan tidak populer lagi. Orang bisa menyampaikan aspirasinya melalui partai politik, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), televisi dan sekian banyak media sosial yang terbuka lebar, hampir-hampir tanpa sensor. Menghadapi persaingan global dan pasar bebas, yang diperlukan oleh generasi muda saat ini adalah sikap kemandirian yang ditopang oleh ilmu pengetahuan, keterampilan hidup (*life skill*), dan semangat patriotisme sehingga hidupnya produktif.

Pengangguran akan mudah menyeret seseorang pada tindak kejahatan. Mungkin saja banyaknya generasi muda yang terjebak narkoba dan pergaulan yang tidak sehat akibat dari tidak adanya lapangan kerja yang membuat mereka sibuk dan produktif, di tengah – tengah gempuran gaya hidup konsumtif-hedonistik. Padahal, derasnya pengaruh asing yang dibawa oleh gelombang globalisasi justru menuntut agar pemuda bangkit memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Jangan sampai generasi muda sekedar jadi generasi penikmat atau perusak, tetapi mesti tampil sebagai generasi penerus pembangun bangsa, mengisi cita-cita kemerdekaan.

Dalam proses transformasi hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam membangun peran aktif generasi muda pada sektor ekonomi hendaknya terjadi pertumbuhan dan pemerataan dengan pemahaman bersama untuk benar-benar mampu melakukan sebuah transformasi. Hambatan yang terjadi adalah pada kualitas sumber daya generasi muda, yang merupakan

faktor kunci penyebab kurang optimumnya pembangunan. Hal ini karena tenaga kerja dari generasi muda tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

Di sisi lain tren globalisasi telah menimbulkan gerak paradoks, yaitu menguatnya identitas lokal yang berakar pada kebangkitan sentimen etnis dan agama. Secara psikologis, ketika seseorang terseret masuk pada orbit globalisasi, dia akan merasa terancam identitas dirinya sehingga mendatangkan rasa tidak aman (*insecure*). Identitas kelompok etnis ini akan semakin menguat ketika bercampur dengan semangat dan kepercayaan agama yang sama. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh generasi muda bahwa perkembangan dunia kehidupan sudah sangat berubah, dan kekuatan budaya lokal menjadi satu modal sosial yang dapat dikembangkan.

#### **D. Kebijakan Kewirausahaan**

Konsep pembangunan yang gagal menurut Joesoef (2014: 158-162) dikarenakan, bersifat partial dan menyendiri, mengabaikan aspek human dari rakyat (manusia) Indonesia. Manusia dalam kehidupannya tidak hanya butuh "*to have more*" tetapi lupa "*to be more*", berarti bahwa mereka self esteem dan ingin dihargai martabatnya dengan dilibatkan, berpartisipasi dalam pemikiran dan pelaksanaan pembangunan.

Etika pembangunan harus melihat masa depan, sehingga harus menghayati untuk dan demi masa depan. Menurut Swasono (2010), pembangunan yang berhasil dan lebih lagi dalam menghadapi globalisasi maka masyarakat khususnya generasi milenial harus lah memiliki kemandirian dalam sikap dan mindset, sikap berdikari dengan menolak ketergantungan pada pihak lain, sikap subordinasi dan menolak mental pengemis. Di sinilah dibutuhkan sebuah kebijakan publik yang dapat mendorong nalar generasi muda untuk Bersama-sama membangun kesadaran bela negara melalui kewirausahaan untuk menjadi pribadi yang mandiri.

Dalam ilmu administrasi keberhasilan sebuah pembangunan memiliki dasar – dasar paradigma yang kuat. Paradigma

*New Public Management* (NPM) yang dipopulerkan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dan Vigado (2002), dan paradigma yang dipopulerkan oleh Denhardt (2003), yaitu administrasi *New Public Service* (NPS) yang mendasari konsep *Governance* dan *Good Governance*, yang dalam proses tatakelolanya melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan tidak cukup kuat menjadi dasar pengelolaan pembangunan bagi pemuda wirausaha. Dibutuhkan konsep *Dynamic Governance* yang memiliki fondasi dasar kuat terhadap pembangunan melalui kultur atau budaya dan kapabilitas, sumberdaya manusia yang berkualitas. *Dynamic Governance* menjadi kunci sukses di dunia yang mengalami globalisasi dan kemajuan teknologi tak kenal lelah.

Dalam *Dynamic Governance* ada dua hal yang menjadi dasar yang kuat bagi kemajuan dalam menghadapi setiap perubahan yang pertama adalah budaya yang meliputi: integritas, meritokrasi, pasar, pragmatisme, multi rasialisme, dan yang kedua adalah kemampuan yang dinamis meliputi: *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Bahkan pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara (1939) pernah memberikan formula 3N untuk mendidik anak-anak bangsa, yaitu: *Niteni*, *Niroke* dan *Nambahi*. *Niteni* adalah kebiasaan untuk melihat hal-hal yang baik dari pihak lain atau bangsa lain, selanjutnya *Niroke* yaitu semangat untuk meniru keunggulan bangsa lain dan *Nambahi* yaitu semangat untuk terus berinovasi memperkaya karya bangsa lain, agar bangsa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Generasi muda adalah subyek dan sekaligus juga obyek, sesungguhnya mereka adalah aset dan subyek pembangunan kalau saja memiliki ketrampilan dan lapangan kerja yang bagus.

Membangun kewirausahaan pemuda Indonesia tentu tidak lepas juga pada pengembangan teknologi dan kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan kreatifitas para pemuda sebagai ujung tombak, dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana disampaikan Florida (2001) yang menyampaikan bahwa keberhasilan dari membangun kewirausahaan pemuda ini tidak akan lepas dari: 1) talenta para pemuda dalam menghasilkan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi,

sehingga diperlukan pemuda-pemuda dengan bakat khusus yang dibawa sejak lahir, sehingga menjadi pemuda yang kreatif, 2) adanya toleransi, di mana lingkungan atau daerah pemuda tinggal memiliki toleransi yang tinggi terhadap gagasan-gagasan kreatif dan kontroversial sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam mendukung ide-ide yang berbeda, 3). teknologi, kehadiran teknologi memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat tumbuhnya ide ide kreatif dalam berwirausaha.

### **E. Peran Generasi Muda**

Generasi muda Indonesia semestinya juga memahami persoalan bangsa dalam aspek-aspek khusus dari sifat sosial dan ekonominya terutama problem pengangguran dan kemiskinan yang menjadi beban negara. Adapun problem ekonomis yang tengah terjadi pada persoalan bangsa seperti Indonesia antara lain: (1) masuknya produk asing dan mayoritas generasi muda telah menjadi konsumen produk-produk asing tersebut, (2) menghadapi tekanan dan ledakan jumlah penduduk yang tidak terkontrol, (3) sumber-sumber alam yang semakin berkurang dan sebagian lagi belum banyak terolah. Dengan melihat kondisi yang berlangsung, diperlukan satu perencanaan pembangunan yang matang, visioner dan memiliki keberpihakan jelas kepada kepentingan nasional serta melibatkan masyarakat.

Generasi Muda adalah pemuda yang menjadi urusan wajib sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam melakukan pembagian urusan kepemudaan ini pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota diperlukan adanya ukuran eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintah. Eksternalitas memperhatikan kriteria pembagian urusan pemerintah dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari peny-

elenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Peran generasi muda diperlukan dalam aksi nyata melalui kewirausahaan yang didukung dengan iklim yang kondusif dengan perubahan cara pandang bahwa kewirausahaan menjadi sebuah budaya dalam kehidupan tatanan bermasyarakat, yang efektif dengan ditandainya beragam harapan dan upaya yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya strategis. Budaya yang efektif ini ditandai dengan munculnya harapan, ide-ide baru dan kreatifitas. Dorongan atas pengambilan resiko, toleransi pada kegagalan dan dorongan belajar serta perjuangan akan kelahiran inovasi.

Kewirausahaan sudah menjadi isu penting dunia dalam menumbuhkan iklim perekonomiannya, sebagaimana disampaikan oleh Kodrat (2009). Di beberapa negara seperti Amerika, Eropa, India, Korea Selatan, Singapura, Jepang, melakukan terobosan-terobosan dalam membangun kewirausahaan dengan dukungan kebijakan Pemerintahannya baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan budaya, juga pada dunia pendidikan.

Semangat kewirausahaan merupakan solusi yang dilatarbelakangi bahwa *creatic destruction* diperlukan untuk mengintroduksi adanya tiga perubahan yaitu: *political change* (perubahan yang berkaitan dengan alokasi kekuasaan serta issue-issue politis di dalam organisasi), *technical change* (perubahan yang terkait dengan bagaimana menciptakan dan mengimplementasikan arsitektur dan strategi bisnis yang baru), dan *cultural change* (perubahan yang terkait dengan bagaimana membangun dan menanamkan *shared values* maupun *common behavior* yang baru untuk mendatangkan arsitektur dan strategi bisnis), Ketiga perubahan diperlukan dalam memulai proses transformasi untuk menjadi *entrepreneurial organization*, penerapan *entrepreneurship* mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penurunan pengangguran. Perkembangan kewirausahaan mempunyai kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Seluruh perkembangan yang terjadi dalam pengembangan kewirausahaan di negara-negara di atas jelas sekali bahwa peran

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat bersinergi untuk mendukung.

Kebijakan pendidikan kewirausahaan pada generasi muda, dari prespektif privat, adalah tingkah laku seseorang yang: a) selalu berinisiatif; b) pantang menyerah; c) berkemauan menggerakkan mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya atau situasi asal menjadi lebih berguna, dan d) menyadari akan risiko dan kegagalan. Di balik perilaku di atas, terdapat dorongan kuat untuk mencapai sesuatu yang besar, penting, atau yang bernilai tinggi, dan siap mempertaruhkan waktu, perasaan-perasaannya, karier maupun kekayaannya, demi mencapai tujuannya. Sedangkan dari perspektif publik, adalah kemampuan melakukan perubahan, inovasi, maupun kemampuan membuat metoda atau tata kerja baru.

Bagi perekonomian suatu negara, kewirausahaan tidak sekedar untuk meningkatkan *income percapita* negara itu, namun juga mendorong tumbuhnya kegiatan usaha baru, yang akan mengubah struktur sosial, struktur dunia usaha dan perekonomian dalam masyarakat. Perubahan itu juga akan mendorong tumbuhnya *demand* baru, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang pada gilirannya mendorong arus masuknya modal untuk investasi, tumbuhnya kebutuhan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan riset (R&D), dan inovasi lebih lanjut, yang secara sinergis akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kewirausahaan senantiasa mendorong tumbuhnya penguasaan teknologi dan penguasaan pasar untuk mampu menghasilkan *out-put* / produk / jasa proses, yang bernilai tinggi. IPTEK dan bisnis merupakan dua sistem dinamis yang saling merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara, bagaikan 2 sisi dari satu mata uang yang sama.

Dalam membangun kewirausahaan generasi muda penting menumbuhkan semangat belanegara sebagai pendidikan karakter. Tumbuhnya karakter generasi muda yang memiliki komitmen, konsistensi, disiplin akan membentuk karakter dengan perilaku yang sadar bagaimana mencintai negaranya. Dengan

demikian tidak akan menjadi beban dan justru memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui kesadarannya. Jadi belanegara bukanlah dalam militerisme tetapi karya nyata dari kejuangan para generasi muda dalam mengembangkan seluruh kemampuannya untuk peran sertanya dalam membangun daerah dan negaranya.

Kita sadari pembangunan dengan berbasis pada generasi muda mencakup pembangunan yang bersifat *community based development* dan pembangunan manusia atau *people centered development*. Sehingga orientasi pendidikan kewirausahaan ini hendaknya dapat meningkatkan martabat generasi muda sebagai manusia untuk memiliki kualitas sumber daya yang unggul. Dengan memiliki kualitas yang unggul, generasi muda mampu menjadi agen pembangunan dan mampu menyesuaikan setiap perkembangan yang terjadi. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu: (1) masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, (2) masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif. Bagaimanapun juga pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan pemuda. Program pembangunan pemuda diharapkan akan melahirkan pemuda atau generasi muda yang kreatif.

Pemberdayaan kewirausahaan generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran bela negara lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi: kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*). Dengan modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) generasi muda serta mudah mentransfer *knowledge*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan generasi muda adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif dalam mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin *suistainable* di dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat khususnya pemuda sebagai anggota kelompok (*how to build thr trust*).

Dalam konteks pemberdayaan ini terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana pemuda dilibatkan dalam proses pembangunan, dan berhak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan dan daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang sebelumnya menjadi obyek kemudian memiliki peran sebagai subyek (Suparjan dan Hempri, 2003:44). Untuk mencapai itu semua ada tahapan yang harus dilewati dalam pemberdayaan ini seperti yang disampaikan oleh Teguh (2004: 83) sebagai berikut :

- Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri
- Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Lebih lanjut disampaikan Winari (1998:76), pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), namun pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

## **F. Kerangka Penerapan *Dyanamic Governance***

Administrasi publik menurut Islamy (2003:7) pada dasarnya berbasis pada makna administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya administrasi publik mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (*service making*). Administrasi publik tidak dikendalikan oleh harga pasar, dan dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak (*social welfare*). Dan

hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan tergantung pada penilaian masyarakat banyak.

Kebijakan pendidikan kewirausahaan dalam menumbuhkan kesadaran belanegara bagi generasi muda, di sini adanya peran penting, sinergi antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan generasi muda sendiri dalam satu pandangan yang sama dimana karakter dan jati diri bangsa sangatlah penting, untuk itu unsur budaya menjadi begitu kuat dalam mewujudkannya. Bhineka tunggal ika menjadi satu syarat utama, untuk itu, *Dynamic Governance* menjadi acuan paradigma yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan kewirausahaan, hal ini karena pada *dynamic governance*, mengikutsertakan semua *Stakeholders*, yaitu pemerintah/sector publik, sector bisnis dan masyarakat madani (*Civil Society*).

Konsep *Dynamic Governance* sendiri merupakan penentuan cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa. Terkait perubahan yang sangat dinamis ini esensi dasar dari *Dynamic Governance* menurut Boon dan Chen (2007) ada dua yaitu budaya dan kemampuan dinamis dari pelakunya.

Pada budaya meliputi: (a) Integritas (*Intrgrity*), generasi muda yang memiliki mindset kewirausahaan tidak melakukan tindakan suap dan korupsi (*incorruptibility*). (b) *Meritocracy* yaitu kewirausahaan yang dilakukan generasi muda adalah wirausaha berdasarkan bakat dan kemampuan atau prestasi. (c) Orientasi pasar yang berkeadilan ini sangat penting dalam mengimplementasikan sila ke lima Pancasila (d) *Pragmatisme* yaitu mudah menyesuaikan dan lebih berorientasi pada pencapaian yang merupakan tujuan negara daripada berkuat pada soal *ideology*. (e) Multietnik yaitu bahwa kewirausahaan pemuda disesuaikan dengan potensi lokal yang di miliki sesuai dengan budaya wilayah yang ada di Indonesia.

Sedangkan pada kemampuan dinamis yang meliputi:

- *Think ahead* (berfikir kedepan), Pendidikan kewirausahaan akan mampu mengajak pemuda memiliki kemampuan

menganalisa kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal dengan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada.

- *Think again* (mengkaji ulang), kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik.
- *Think across* (belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain), kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk 'berpikir diluar batas', juga untuk 'belajar dari orang lain' apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru. Itu seperti meng-*copy* kegiatan/praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat.

## G. Penutup

Pendidikan kewirausahaan sangat penting dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat generasi muda, sebagai generasi yang mampu menjadi agen pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam menghadapi bonus demografi penguatan daya saing dapat ditempuh melalui, penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi bagi peningkatan kreativitas, inovasi, bagi generasi muda yang prosesnya dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Hal ini juga menjawab menguatkannya fenomena *information-based society* dan *knowledge based society* harus disikapi, karena perubahan ini juga sudah menjadi tekanan yang luar biasa dari dunia luar sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi.

Pendidikan kewirausahaan dengan mengedepankan budaya lokal akan membangun karakter dan jatidiri generasi muda sebagai tren paradoks dari globalisasi. Indonesia yang memiliki budaya sangat beragam tentu saja hal ini menjadi satu peluang yang harus dikembangkan oleh generasi muda sesuai dengan kondisi kontekstual dari daerahnya.

Pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari bela negara akan berjalan dengan baik apa bila terjalin sinergi antara semua stakeholder sebagai komitmen bersama dalam mendorong

*Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan Dalam Menumbuhkan Kesadaran*  
pemuda sebagai agen perubahan pembangunan khususnya pada  
sektor ekonomi.

## **BIBLIOGRAFI**

- Abdulah, S, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Swara Pembaharuan.
- Abdullah, Taufik, 1974, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Yasin, 1974, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Eko, Sutoro, 2004, "Model Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal," *Analisis CSIS* 33 (3): 299-326
- E. Stiglitz, Joseph, 2006, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang lebih Adil*
- Holt, K, David, 2005, *Entrepreneur & Entrepreneurship*, Jakarta: Kencana.
- Joesoef, Daoed, 2014, *Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kompas.
- , 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, Jakarta: Kompas.
- Kasim, Azhar dkk, 2017, *Merekonstruksi Indonesia, Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*, Jakarta: Kompas.
- Kodrat, David S, 2009, *Manajemen Strategi: Membangun Keunggulan Bersaing Era Globalisasi Di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- ....., 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan
- ..... 2015, *Revolusi Pancasila*, Bandung: Mizan.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi): Sepuluh Prinsip untuk Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: PPM.

Sing, Boong & Chan Geraldin, 2007, *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilites and Change in Singapore*, Singapore: World Scientific Publishing.co. Pte. Ltd.

Swasono, Sri Edi, 2010, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta.

Vigado, Eran, (editor), 2002. *The Legecy of Public Administration: Background and Review. Dalam Public Administration: An Interdisiplinary Critical Analysis*, New York: Marcel Dekker, Inc.